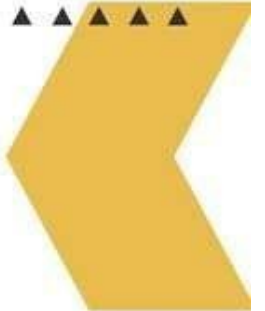




SATPOL PP

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

LAKIP



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum Tupoksi/Isu Strategis/Tujuan	2
C. Maksud & Tujuan	7
D. Cascading Kinerja.....	8
E. Gambaran Umum SOPD	10
F. Sistematika Penyusunan Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	16
B. Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja	18
C. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	20
D. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	30
B. Realisasi Anggaran	60
C. Kinerja Lainnya	62
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Tindak Lanjut.....	69

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Hal.</i>
Tabel 2.1	18
Tabel 2.2	18
Tabel 2.3	20
Tabel 2.4	20
Tabel T-C 33	22
Tabel 2.4	28
Tabel 2.5	28
Tabel 2.6	29
Tabel 2.7	29
Tabel 3.1	31
Tabel 3.2	33
Tabel 3.3	34
Tabel 3.4	36
Tabel 3.5	36
Tabel 3.6	38
Tabel 3.7	41
Tabel 3.8	45
Tabel 3.9	46
Tabel 3.10	48
Tabel 3.11	49

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>Hal.</i>
Gambar 3.1	34
Gambar 3.2	35
Gambar 3.3	36
Gambar 3.4	38
Gambar 3.5	39
Gambar 3.6	46
Gambar 3.7	47
Gambar 3.8	48
Gambar 3.9	50

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Balangan 2024 di susun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan bentuk Akuntabilitas Publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan Anggaran yang di percayakan kepada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Laporan ini sebagai media Informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja di sajikan melalui pengukuran dan Evaluasi Kinerja serta Pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Kinerja Instansi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Strategis berdasarkan indikator indikator yang di tetapkan, di harapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil , relevan, efisien, efektif dan berkelanjutan di tahun perencanaan selanjutnya dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja yang berkelanjutan.

Tujuan dari Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, yang salah satu dari komponen penilaian dapat di lihat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan bahan pencapaian kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi , tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan memiliki 2 (dua) Sasaran, dan 2 (dua) Indikator Sasaran yang harus di laksanakan. Dari sasaran yang sudah di tetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dapat di ikhtisarkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran berkategori Sangat Tinggi. Hasil capaian kinerja di atas akan di jadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya dan sebagai bahan masukan kepada seluruh bidang dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan agar lebih baik lagi pada tahun mendatang, adapun penjelasan umum dari data yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menurunya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Menurunya Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	10%	11,11%	111,10%

Capaian indikator kinerja tersebut diperoleh :

1. Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\% \\ &= \frac{18}{18} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah gangguan Trantibum (n-1)} - \text{Jumlah Gangguan Ytantibum (n)}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum Tahun (n)}} \times 100\% \\ &= \frac{60-54}{54} \times 100\% \\ &= 11,11\% \end{aligned}$$

Capaian Kinerja sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda tahun 2024 sebesar 100% di peroleh dari realisasi 100% dari target kinerja 100%, Realisasi sebesar 100% di peroleh dari jumlah Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti sebanyak 18 kasus dari jumlah pengaduan pelanggaran perda yang di terima baik secara online maupun off line sebanyak 18 Kasus.

Capaian Kinerja sasaran menurunnya gangguan trantibum pada tahun 2024 adalah sebesar 111,10% di peroleh dari realisasi sebesar 11,11% dari target kinerja sebesar 10%, realisasi sebesar 111,10% di peroleh dari Jumlah gangguan trantibum tahun lalu (n-1) di kurangi jumlah gangguan trantibum tahun ini (n) di bagi Jumlah gangguan trantibum tahun ini (n) .

Hambatan Pencapaian tujuan dan sasaran kinerja terdiri dari :

1. banyaknya peraturan daerah yang harus dikawal dan perlu ditegakkan sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan penegakannya.
2. Terkadang terdapat ketentuan di dalam peraturan yang membatasi ruang gerak ketugasan Satpol PP dalam melaksanakan optimalisasi penegakan perda
3. Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya kondisional dan dinamisasi keadaan serta

peraturan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan

4. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan perda dan perkada.
5. Kurangnya pelatihan teknis terkait deteksi dini dan cegah dini untuk petugas patroli pengamanan dan pengawalan dalam pengendalian gangguan trantibum

Langkah langkah Pemecahan Masalah yang di lakukan Satuan polisi Pamong Praja kabupaten Balangan terdiri dari :

1. Optimalisasi Koordinasi dan sinergisitas dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal melalui Forkompimda dalam mengurangi pelanggaran Perda dan Perkada
2. Intensifikasi dan koordinasi dengan OPD terkait dalam upaya mengawal penegakan perda dan perkada di Kabupaten Balangan.
3. Optimalisasi Strategi dalam Penegakan Perda dan Perkada baik yustisi maupun nonyustisi dalam rangka memberikan stimulus kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.
4. Meningkatkan profesionalisme petugas lapangan satuan Polisi Pamong Praja dalam pengembangan sumberdaya manusia baik secara fisik maupun pengetahuan pendukung ketugasan dalam pencegahan gangguan Trantibum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Balangan No 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi . Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan perencanaan strategis yang di tetapkan masing-masing Instansi. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
2. Mendorong Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2024

di sampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

B. Landasan Hukum/Tupoksi/Isu Strategis/Tujuan

Landasan Hukum

Penyusunan SAKIP di dasarkan pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Permendagri No. 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Permendagri No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
7. Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Tekhnis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Permendagri No 51 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Bupati Balangan No 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban tersebut di sajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

1. Tupoksi

Tugas dan Fungsi Peta Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kabupaten Balangan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) melaksanakan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- (3) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 1. ketenteraman;
 2. ketertiban umum; dan
 3. perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan administrasi satuan; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

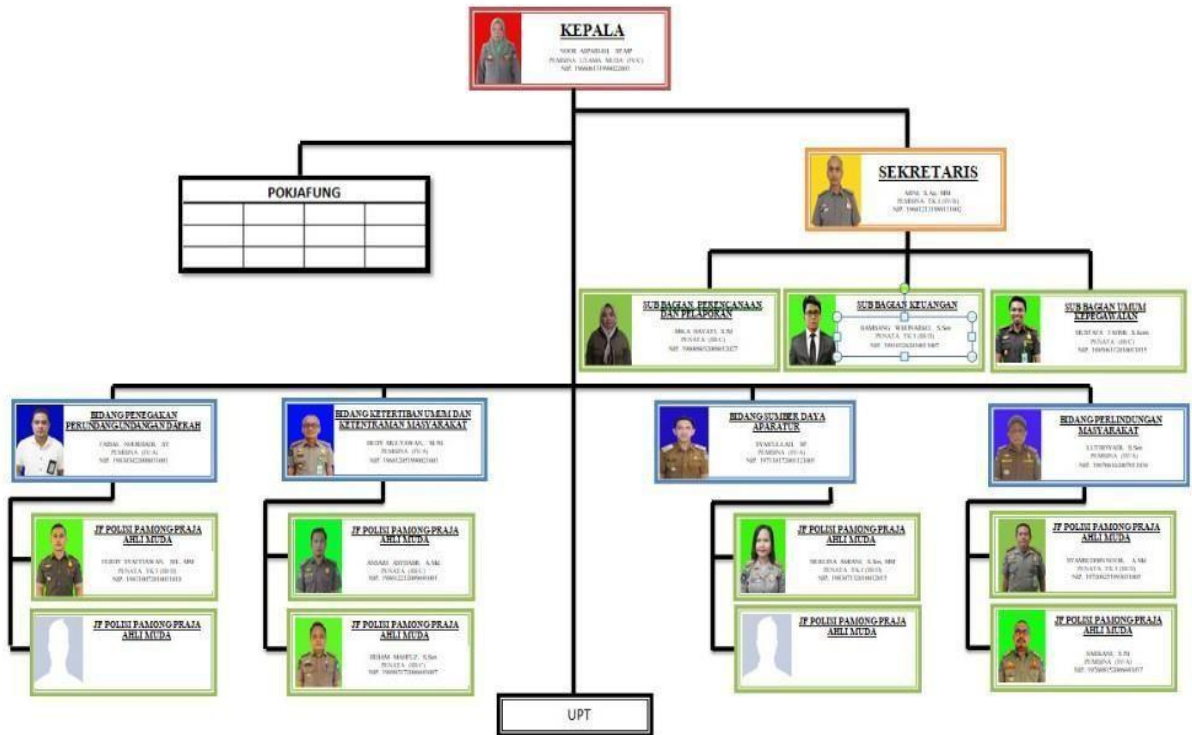
Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Balangan seperti yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Unsur-unsur organisasi satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah .
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Struktur Organisasi

Di bawah ini di sajikan Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan :



2. Isu Strategis

Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki peran serta baik aktif maupun pasif dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Balangan dalam memelihara dan menjaga serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kondisi tersebut di atas. Akan tetapi di dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi peningkatan kualitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat seringkali terdapat keadaan yang dinamis di masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Balangan, baik secara sosial, ekonomi, maupun perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan isu strategis, masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tidak dapat dipisahkan dan menjadi hal yang mendasar sebagai unsur pendukung terwujudnya keberhasilan pencapaian sasaran pemerintah daerah. Dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan serta sinergitas semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Isu strategis yang menjadi tantangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP kabupaten Balangan adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda kabupaten Balangan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan data pelanggaran perda Kabupaten Balangan. Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, bahkan dapat dikatakan signifikan dari tahun 2021, dan juga jumlah pelanggaran perda tersebut menunjukkan trend positif dari target pelanggaran perda pada tahun 2024, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Memang tidaklah mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda menjadi 0 % (zero ground) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran, khususnya para pedagang kaki lima di kabupaten Balangan yang melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Balangan. Ditambah dinamisasi peraturan dan banyaknya jumlah Perda kabupaten Balangan yang bersanksi pidana sangat memungkinkan masyarakat bersinggungan secara langsung dengan pemenuhan kewajiban dan larangan di dalam Perda yang harus dipatuhi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan , baik secara represif non yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda harus terus dipertahankan dan dioptimalkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggar sehingga akan efektif mengurangi angka pelanggaran perda Kabupaten Balangan.

Keberadaan sebuah institusi bergantung dari sejauh mana institusi tersebut mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu - isu strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan antara lain sebagai berikut :

1. Pemenuhan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam pemenuhan SPM belum didukung penuh, terutama dalam hal peningkatan kapasitas SDM serta pemenuhan sarana prasarana penyelenggaraan urusan trantibumlinmas.

2. Kejahatan jalanan / klithih yang makin marak.

Perlu adanya patroli gabungan yang intens dilakukan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, Polres Balangan, peningkatan program Satpol PP Go To School, serta membangun partisipasi aktif Satlinmas Desa untuk mengedukasi dan tindakan preventif warga masyarakat di wilayahnya agar tidak terlibat kejahatan jalanan / klithih.

3. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Balangan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Balangan serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Balangan.

- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
- d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

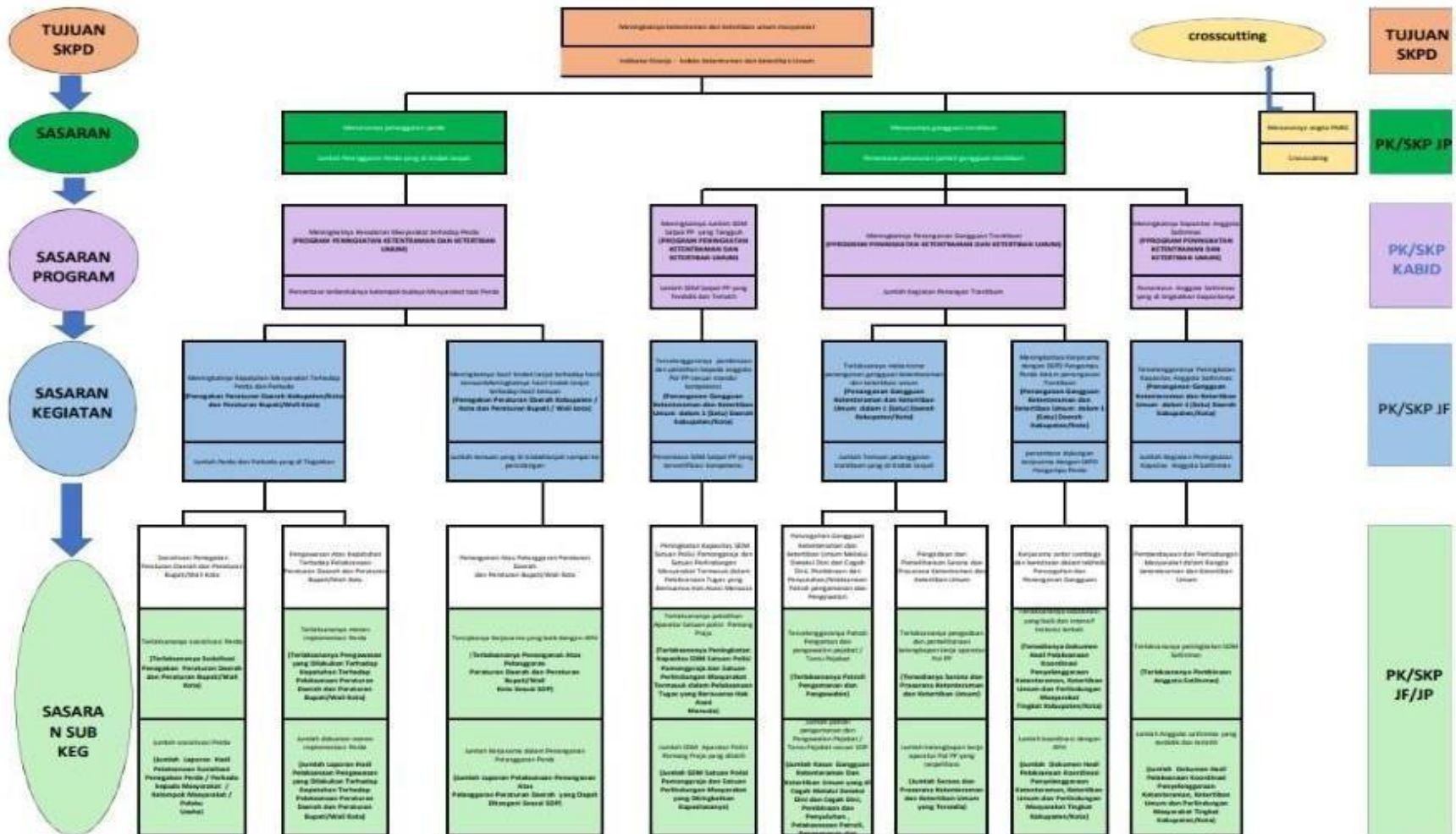
2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah :

- Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 bertujuan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.
- Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2024.
- Melakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
- Menerapkan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Balangan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



5. Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023

NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
A Perencanaan Kinerja			
	Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memberikan Informasi tentang Hubungan Kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar Bidang dengan Tugas dan Fungsi lain yang berkaitan dengan Crosscutting	Menyempurnakan diagram crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja	Penyempurnaan Diagram Crosscutting yang menggambarkan kesinambungan antar unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja
	Aktifitas yang di laksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin di capai	Menyesuaikan antara target yang ingin dicapai dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan	Melakukan Penyesuaian antara Target dengan rencana aksi
	Dokumen Evaluasi Kinerja Belum di Legalkan	Dokumen Monitoring Evaluasi agar dilegalkan dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas	Membuat Dokumen Monitoring Evaluasi yang telah di Legalkan
B Pengukuran Kinerja			
	Pengukuran Kinerja telah di laksanakan secara berkala, namun tetapi tidak di ketahui kapan pelaksanaan pengukuran kinerja	Menyusun Jadwal Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala	menjadwalkan Pengukuran kinerja secara Berkala per triwulan

6. GAMBARAN UMUM SKPD

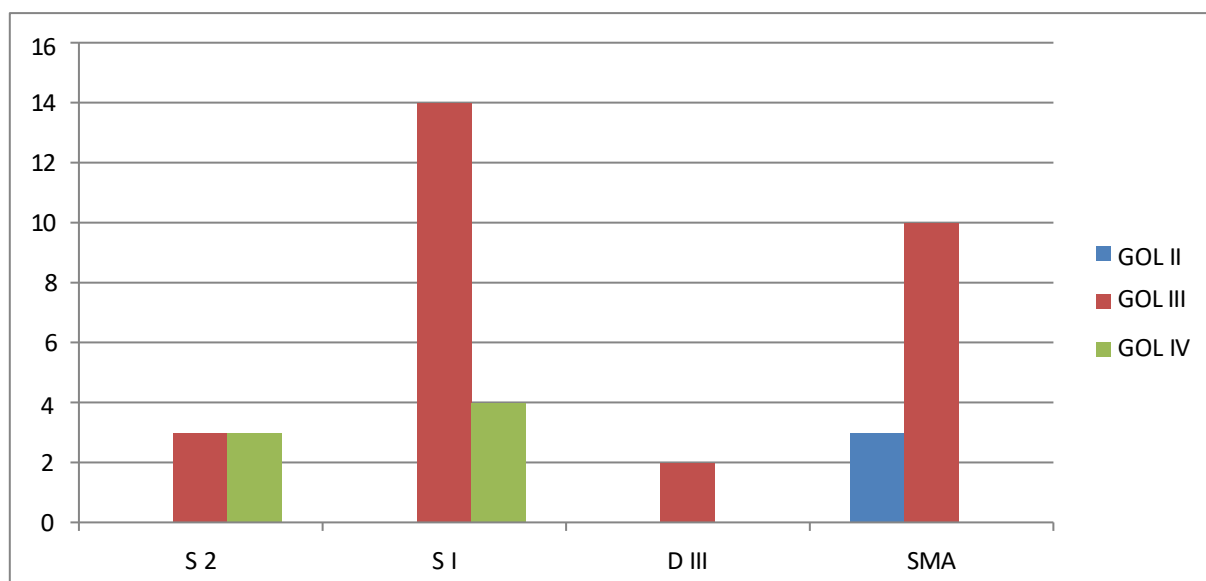
1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terdiri dari Karyawan / karyawati di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2024 berjumlah 264 pegawai yang terdiri dari 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 225 Tenaga Kontrak, dengan perincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	
1	SD					
2	SMP					
3	SMA		3	10		13
4	D- 1					
5	D- 2					
6	D- 3			3		2

7	D- 4/S- 1					
8	S- 1			14	4	18
9	S-2			3	3	6
10	S- 3					
Jumlah			3	30	7	40

Berdasarkan data pada tabel di atas tingkat pendidikan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan CUKUP TINGGI, di dominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 18 orang (46,15%) disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 13 orang (33,33) S2 6 orang (15,38%) D3 3 orang (5.13%) Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki - laki bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki - laki. Hal ini menunjukkan masih belum maksimalnya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Persentase Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan Dapat di lihat pada Grafik di bawah ini :



Masih terdapat kekurangan pegawai, Meskipun masih terdapat banyak kekurangan pegawai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan mempunyai tambahan 225 Tenaga Harian Lepas (THL) Hal ini tentu membantu pada optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan strategis di bidang kelembagaan dan tata laksana, standarisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi.

1. Sarana Prasarana

Sarana peralatan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan belum memadai

baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada setiap Bidang. Sarana pendukung utama administrasi berupa komputer, laptop, printer, dan proyektor LCD juga masih minim jumlahnya (sebagian merupakan komputer lama / sudah rusak atau dalam kondisi mati total dan sudah diusulkan untuk penghapusan aset pada tahun 2024). Kamera dan peralatan sound system untuk pelaksanaan zoom meeting juga belum tersedia sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan rapat online di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

Ketersediaan ruangan kerja dan ruang rapat pada gedung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menjadi persoalan karena kurang memadai. Saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan hanya memiliki 1 ruang rapat dengan kapasitas ruangan 10 – 20 orang. Kebutuhan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai lembaga maupun OPD lainnya membutuhkan ruang rapat dengan daya tampung yang besar., begitu juga ruangan Sekretariat PPNS dan ruang penyidikan. Hal ini tentunya penting, mengingat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah”. Selanjutnya pada Pasal 9 disebutkan bahwa dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya, dimana penunjukan tersebut dilakukan oleh Kepala Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan selaku aparat penegak Perda / Perkada juga membutuhkan Command Center yang merupakan suatu ruangan khusus yang berfungsi sebagai pusat komando yang dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi yang diperlukan. Command Center akan menjadi tempat dimana Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan selaku pengambil keputusan bersama - sama dengan tim, melakukan pertemuan, mengambil keputusan menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis / permasalahan yang dihadapi, baik tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaan, dan langkah penyediaan informasi publik. Command Center sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sarana mobilitas penunjang utama penegakan Perda / Perkada yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan juga masih kurang memadai, dikarenakan armada roda empat yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sebagian besar sudah berumur tua .Sangat dibutuhkan mobil patroli yang memadai untuk pelaksanaan patroli pengawasan kejahatan jalanan (klithih) di tengah malam hingga subuh dan truk sky lift yang dapat memudahkan dalam penertiban reklame. Kebutuhan akan garasi Mobi Operasional dan Pengawalan.

Tim Reaksi Cepat Atau Treck yang tersebar di 8 Kecamatan terutama sebagai garda

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	GEDUNG KANTOR	3	BUAH	BAIK
2	HAND TALKY	30	BUAH	BAIK
3	PAKAIAN DALMAS	40	PAKET	BAIK
4	ROMPI	160	BUAH	BAIK
5	KENDARAAN OPERASIONAL			
	a. Kendaraan Roda 2 (dua) Pengawalan	7	UNIT	5 BAIK, 2 RUSAK
	b. Mobil Operasional Pengawalan	2	UNIT	BAIK
	c. Mobil Operasional Patroli	4	UNIT	BAIK
		246		terdepan

Penanganan Trantibum di wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana, yang memadai Sarana Prasarana yang di miliki Satuan Polisi Pamong Praja dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

2. Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Kabupaten Balangan berasal dari APBD Daerah Kabupaten Balangan. Terlihat pada anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 21.223.734.657 yang terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan belanja Modal Peralatan dan Mesin, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

URAIAN BELANJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah / (Berkurang)	
			(Rp)	(%)
BELANJA OPERASI	Rp18.136.939.315,00	Rp20.109.902.677,00	Rp1.972.963.362,00	9.81
Belanja Pegawai	Rp6.610.104.845,00	Rp7.979.873.187,00	Rp1.369.768.342,00	17.17
Belanja Barang dan Jasa	Rp11.526.834.470,00	Rp12.130.029.490,00	Rp603.195.020,00	4.97
BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp1.113.831.980,00	Rp1.113.831.980,00	100.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp954.835.400,00	Rp954.835.400,00	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp133.996.580,00	Rp133.996.580,00	100.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	100.00

7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum/Tupoksi/Isu Strategis/Tujuan
- C. Gambaran Umum SKPD
- D. Sistematika Penyusunan Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- A. Renstra SKPD
- B. IKU SKPD
- C. Renja SKPD
- D. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan Kinerja SKPD lainnya

- A. Penghargaan
- B. Inovasi
- C. Rencana Aksi atas LHE SAKIP tahunan dari Inspektorat

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan terukur, Instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merupakan manifestasi komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan perumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2021- 2026 tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMD Kabupaten Balangan merupakan dokumen landasan/acuan pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan di lakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Balangan tahun 2021 -2026.

a. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, maka untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan adalah dengan mewujudkan Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan sesuai dengan Visi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, yaitu:

“MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya di canangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur perdesaan dan perkotaan ;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat balangan Berbasis Pertanian dan Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintah sebagai abdi Masyarakat dan Abdi Negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial , Budaya dan Agama serta pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif;

Berkaitan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terkait langsung dengan misi ke- 5 sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yaitu “ **Mewujudkan kehidupan sosial , Budaya dan Agama serta pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif** “

Pada tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Inspektorat yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Inspektorat menyusun Dokumen Penyesuaian Renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Tim Kemenpan RB.

Berdasarkan RPJMD tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021- 2026. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menetapkan tujuan strategis selama lima tahun (2021 - 2026) yaitu meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang di ukur melalui Indeks Ketenteraman dan Ketrriban Umum, seperti dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	INDEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

b. Sasaran

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Maka untuk mencapai sasaran yang di inginkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menetapkan Dalam Rencana strategis Tahun 2021 -2026 terdiri dari 2 (dua) sasaran Strategis yaitu

1. Menurunnya Pelanggaran Perda (SASARAN I)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
MENURUNNYA PELANGGARAN PERDA	PERSENTASE PELANGGARAN PERDA YANG DI TINDAKLANJUTI			100%	100%	100%	100%

Tabel II.1. Sasaran Strategis I (Satu) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

2. Menurunnya Gangguan Trantibum (SASARAN II)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
MENURUNNYA GANGGUAN TRANTIBUM	PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN TRANTIBUM			10%	10%	10%	10%

Tabel II.2. Sasaran Strategis II (Dua) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

B. Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Balangan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021-2026 Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dilakukan Penyesuaian berdasarkan Permendagri no.900.1.15.5.13-17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri dalam Negeri No 050.5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2023 tentang penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 . Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga indikator kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan telah menetapkan Indikator Kinerja Strategis yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dan bersifat menunjang atau tidak mendukung secara langsung pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan. Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 tahun kedepan sesuai yang tertuang dalam dokumen Penyesuaian RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti
2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum

Berikut ini tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Renstra Penyesuaian Periode 2021-2026.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Menigkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti
		Menurunnya Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan gangguan trantibum

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021- 2026 dapat dilihat, pada tabel Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Tabel.2.3.IKU Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
1	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	Pelanggaran Perda akan menurun Dengan di tindaklanjutinya kasus pelanggaran Perda yang terjadi dengan memberi efek jera dan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap perda	Mencerminkan Penurunan Pelanggaran Perda dengan di tindaklanjutinya pelanggaran perda yang terjadi	Jumlah Kasus Pelanggaran perda yang di tindak lanjuti/(Jumlah Kasus Pelanggaran Perda x 100%	Satpol PP	Satpol PP
2	Menurunnya gangguan Trantibum	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum akan menurun dengan menurunnya jumlah kasus pelanggaran gangguan ketenteraman dan ketertiban	Mencerminkan Penurunan jumlah gangguan Ketenetraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Trantibum (n-1) - Jumlah Pelanggaran (n)/jumlah Pelanggaran (n) x 100%	Satpol PP	Satpol PP

Tabel.II.4.IKU Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

C. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

Dengan memperhatikan arah pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2024, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (Dua) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan, adapun

program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah kabupaten / Kota :
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - b. Administrasi keuangan dan perangkat daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Daerah
 - f. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah / Kota
 - b. Penegakan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan peraturan Bupati / walikota.

Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam rangka mencapai sasaran kinerja tahun 2024 dapat diuraikan dalam sebagai berikut :

Tabel T-C.33.
 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
 Kabupaten Balangan

lembar dari

Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	25.586.964.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	28.145.660.950	
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Angka (Nilai sakip)	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,40	8.287.731.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	76,40	9.116.504.870	
1	05	01	2	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitasi Dukumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	210.627.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	231.689.700	
1	05	01	2	0001	Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	122.054.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	bimtek & perjalanan dinas	2 Dokumen	134.259.950
1	05	01	2	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	29.032.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- ATK, Makan Minum & Perjalanan Dinas	1 Laporan	31.935.750

1	05	01	2	0007	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	59.540.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- ATK, Bmtek & Perjalanan Dinas	1 Laporan	65.494.000
1	05	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitas Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6.522.394.750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	7.174.634.225
1	05	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	43 Orang	6.522.394.750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Gaji dan Tunjangan	43 Orang	7.174.634.225
1	05	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitas Administrasi kepegawaian dan perangkat Daerah yang terlayani	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	632.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	695.530.000
1	05	01	2.1	0009	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	315.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Pendidikan & Pelatihan Khusus Satpol	Orang	347.050.000
1	05	01	2.1	0011	Bimbingan Teknis Implementasi perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	316.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Bimtek & Perjalanan Dinas	Orang	348.480.000
1	05	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase dan fasilitas umum Perangkat Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	356.978.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	392.675.910
1	05	01	2.1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	53.880.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- ATK, Benda Post	Paket	59.268.660
1	05	01	2.1	0005	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	21.547.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Cetak dan Penggandaan	Paket	23.702.250
1	05	01	2.1	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	8.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Surat Kabar dan Majalah	Dokumen	9.350.000

1	05	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	273.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Perjalanan Dinas	Laporan	300.355.000
1	05	01	2,1		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	Persentase Fasilitas Pengadaan barang milik Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10.553.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	11.608.300
1	05	01	2,1	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	10.553.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Belanja bahan pakai habis	Unit	11.608.300
1	05	01	2,1		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	134.813.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	148.295.290
1	05	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Kumunikasi sumber daya air ,dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	134.813.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Listrik dan Air	36 Laporan	148.295.290
1	05	01	2,1		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	420.064.950	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	462.071.445
1	05	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Unit	403.864.950	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- BBM, Suku Cadang, Pajak Kendaraan Dinas	Unit	444.251.445
1	05	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Unit	16.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Pemeliharaan Alat Kantor dan Peralatan Komputer	Unit	17.820.000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Kegiatan	17.299.232.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		750 Kegiatan	19.029.156.080
				Persentase SDM SatpolPP yang Terdidik dan Terlatih		Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		80%			

						Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	
						Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	
1	05	02	2		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	Jumlah Temuan pelanggaran trantibum yang di tindak lanjuti	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Kasus	8.287.731.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		54 kasus	9.116.504.870
					Jumlah SDM Satpol PP yang tersertifikasi kompetensi	20 Orang		20 Orang					
					Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	2355 Orang		2355 Orang					
					persentase dukungan kerjasama SKPD Pengampu Perda	70%		80%					
1	05	02	2	0004	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	1.927.714.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Honor tim pelaksana kegiatan dan makan minum kegiatan	8 Dokumen	2.120.485.620
1	05	02	2	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	414.811.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Diklat Dasar, PPNS dan PPNS Manajemen	10 Orang	456.292.100
1	05	02	2	.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	120.795.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- Honor tim pihak ketiga dan makan minum kegiatan	4 Dokume	132.874.500
1	05	02	2	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 laporan	5.967.490.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Honor Anggota Non ASN	18 laporan	6.564.239.990

1	05	02	2	.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	61.580.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Service Mobil Operasional	1 Unit	67.738.000
1	05	02	2		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	Jumlah Perda dan Perkada yang di Tegakkan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Perda	519.110.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		24 Perda	571.021.000
				Jumlah temuan yang di tindaklanjuti sampai ke persidangan		Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kasus%	10 Kasus%					
1	05	02	2	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	111.890.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	=-Makan minum kegiatan dan perjalann dinas	8 Laporan	123.079.000
1	05	02	2	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	407.220.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	-Honor tim dan makan minum	24 Laporan	447.942.000

D. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam kelengkapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Balangan .

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan disusun dengan memperhatikan Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang selanjutnya menjadi indikator kinerja utama Inspektur Kabupaten Balangan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya Pelanggran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di tidadak lanjuti	100%
2	Menurunnya Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan Gangguan trantibum	10%

Berdasarkan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tersebut diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Bupati Balangan. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupkosinya adalah:

Tabel 2.5
Rincian Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	8.747.709.695
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.389.229.620
JUMLAH		18.136.939.315

Pada tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya Pelanggran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di tbdak lanjuti	100%
2	Menurunnya Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan Gangguan trantibum	10%

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, Melakukan Perjanjian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 berdasarkan PK Perubahan Tahun 2024:

Tabel 2.7
Rincian Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Tahun 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	11.013.201.417,00
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	10.210.533.240,00
JUMLAH		Rp	21.223.734.657,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang di perjanjikan tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Menetapkan Kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata – rata atas indikator kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja dengan melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Di dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terlebih dahulu suatu Instansi Pemerintah membuat suatu pernyataan perjanjian kinerja sebagai komitmen dari Instansi Pemerintah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Di dalam penetapan perjanjian kinerja telah dijabarkan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program dan kegiatan yang terwujud dalam suatu target pencapaian yang kuantitatif agar dapat dinilai tingkat keberhasilan dari masing – masing sasaran.

Oleh karena itu dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, maka di gunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori Capaian	Angka Interpretasi
1	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 - 90	Memuaskan
3	> 70 - 80	Sangat Baik
4	> 60 - 70	Baik
5	> 50 - 60	Cukup Baik
6	> 30 - 50	Kurang
7	0 - 30	Sangat Kurang

Capaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan

Tujuan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang tertera pada Renstra satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat” dengan indikator tujuan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum .

Untuk Indikator Indeks Ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun 2024 dengan realisasi 100% dari target sebesar 100% dan memperoleh capaian 100%, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum di ambil dari hasil Survei melalui kuesioner ketenteraman dan ketertiban Umum tahun 2024 dengan sampel kelompok masyarakat petani, masyarakat pedagang dan ASN yang tersebar di 8 Kecamatan yang ada di kabupaten Balangan.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja akhir RENSTRA 2021-2026 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AWAL 2021	TARGET AKHIR 2026	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
MENINGKATKAN YA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT	INDEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI

2. Sasaran Strategis

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang di peroleh bersifat absolute merupakan hasil operasi aritmatika pembobotan mulai dari kegiatan hingga ke sasaran, namun karena terdapat hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan-kegiatan pendukungnya sehingga pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan yang berupa indikator kinerja input, output, outcome, benefit dan impact.

Seluruh pengukuran capaian kinerja LKJP ini disusun secara absolute dan terfokus pada satu atribut sehingga dapat mengeliminir distorsi yang disebabkan oleh aritmatik pembobotan. Untuk mengukur capaian kinerja kegiatan.

A. SASARAN I (SATU) MENURUNNYA PELANGGARAN PERDA

1. Capaian Kinerja 2024 terhadap target kinerja 2024

Sasaran Strategis satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang tertera pada Renstra satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 yaitu menurunnya pelanggaran Perda dengan Indikator Kinerja sasaran Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti dengan capaian 100% dari target kinerja 100% seperti yang di rumuskan di bawah ini:

1. Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti

$$= \frac{\text{jumlah Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti}}{\text{jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$$

$$= \frac{18}{18} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

1.1 Analisis Capaian Kinerja 2024 Terhadap Target Kinerja 2024

Capaian Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 untuk sasaran I(satu) menurunnya pelanggaran Perda dengan Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti adalah sebanyak 18 Kasus pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti dari 18 Kasus pelanggaran pelanggaran perda yang terjadi dengan capaian sebesar 100%.

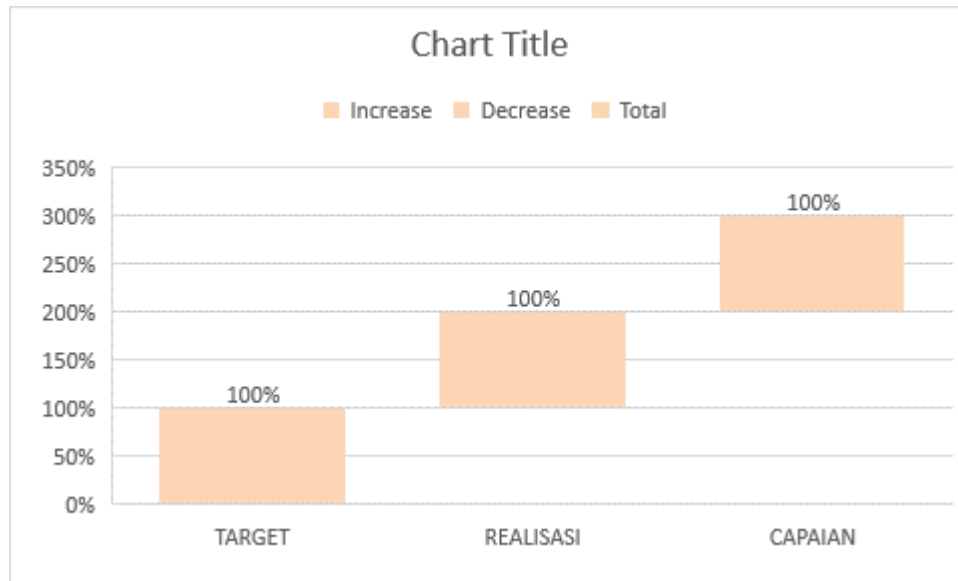
Rincian Capaian Realisasi Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Satuan Polisi pamong Praja 2024 untuk sasaran I (Satu) menurunnya Pelanggaran Perda.

dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.3.2.
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Utama 2024 terhadap Target Kinerja Utama Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN
Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%

Gambar .3.1.
Diagram Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja utama tahun 2024 terhadap Target Kinerja Utama Tahun 2024



Gambar Diagram Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap target Kinerja 2024

2. Capaian Kinerja 2024 Terhadap capaian Kinerja Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap capaian kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (Realisasi) dengan kinerja yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap capaian kinerja Tahun 2023 untuk sasaran menurunnya Pelanggaran Perda dengan Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti di sajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel.3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap capaian Kinerja 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di Tindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

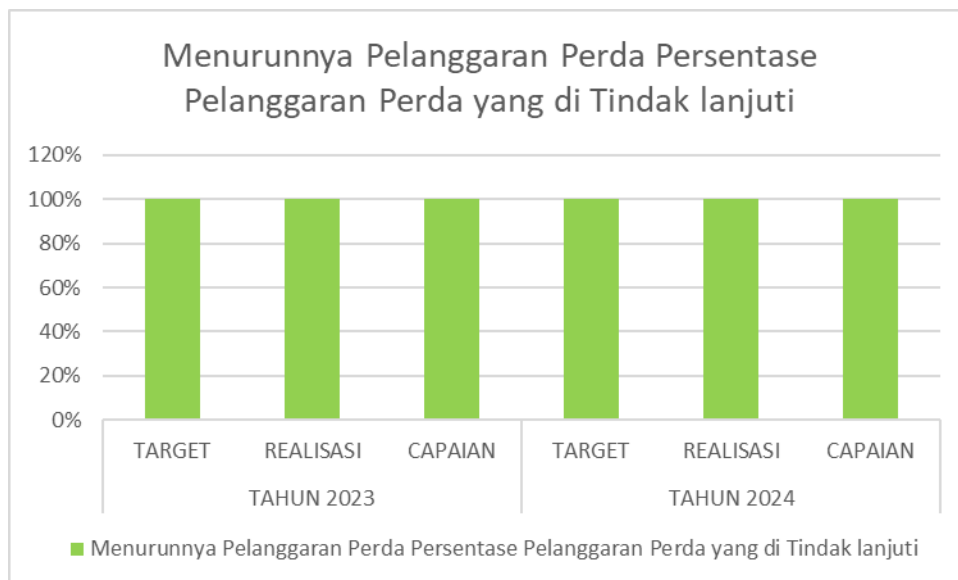
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023

2.1 Analisis Perbandingan capaian Kinerja 2024 terhadap Capaian Kinerja 2023

Capaian Kinerja di tahun 2024 sasaran menurunnya pelanggaran Perda dengan Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti adalah 18 Kasus Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti dari 18 Kasus pelanggaran Perda yang terjadi dengan Capaian 100% dengan Kategori sangat Tinggi, pada tahun 2023 untuk Indikator Menurunnya Pelanggaran Perda dengan Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang di Tindaklanjuti terdiri dari 20 Kasus Pelangagran Perda yang di tindaklanjuti dari 20 kasus Pelangagran Perda yang di terima dengan capaian 100%, dengan penurunan kasus pelangagran sebanyak 2 kasus.

Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap capaian kinerja 2023 dapat di lihat pada Grapafik di bawah ini:

Gambar.3.2.
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Utama 2024 terhadap capaian Kinerja Utama (SASARAN I) Tahun 2023



3. Capaian Kinerja 2024 Terhadap Target RENSRA 2021-2026

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Satuan polisi Pamong Praja Tahun 2024 terhadap target akhir Rensta dengan Tahun 2021 -2026 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (Realisasi) dengan Target

capaian akhir kinerja Renstra 2021-2026.

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Utama Tahun 2024 terhadap Target akhir Renstra 2021-2026 untuk sasaran menurunnya Pelanggaran Perda dengan Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti di sajikan dalam Tabel di bawah ini:

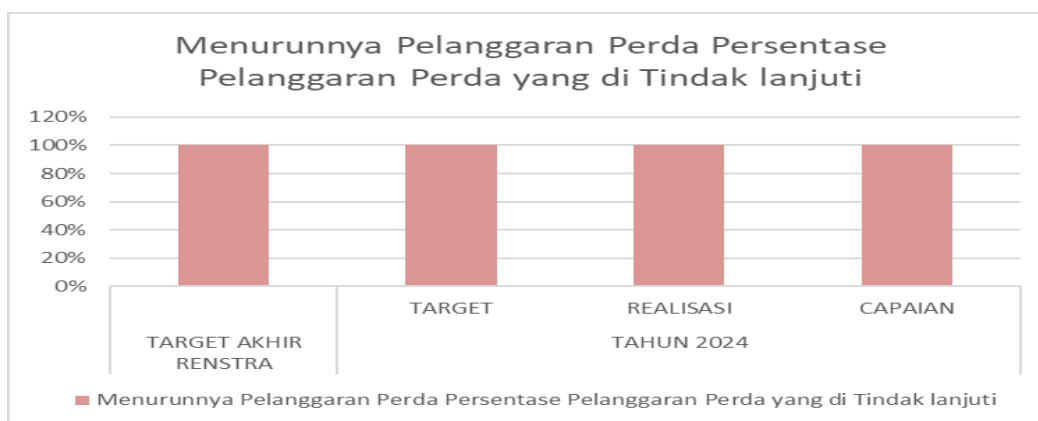
Tabel.3.5.
Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap target akhir Renstra (2021-2026)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di Tindak lanjuti	100%	100%	100%	100%

Tabel.3.6. Perbandingan Capaian Kinerja 2024 Terhadap Capaian akhir Renstra 2021-2026

Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap capaian akhir Renstra 2021-2026 dapat di lihat pada Grapafik di bawah ini:

Gambar.3.3.
Gambar Diagram Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja 2024 terhadap target akhir renstra 2021-2026



Gambar Diagram capaian kinerja 2024 terhadap target akhir renstra 2021-2026

3.1 Analisis Capaian Kinerja 2024 Terhadap Target akhir Renstra 2021-2026

Capaian 2024 untuk Indikator Kinerja Persentase pelanggaran perda yang di tindaklanjuti adalah sebanyak 18 Kasus pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti dari 18 kasus pelanggaran Perda yang terjadi dengan capaian 100% terhadap target Akhir Renstra adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

4. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Standar Nasional Tahun 2024

Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Namun dalam pelaksanaannya aturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini sudah ada revisi terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan target nasional yang di adopsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang tertuang dalam target capaian indikator dengan target nasional yakni sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase Pencapaian Penerima Layanan dasar
- b. Target pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa target pada tahun 2024 target nasional sebesar 100%. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam menentukan target capaian dalam dokumen perencanaan strategis mengacu kepada program nasional sehingga pencapaian setiap tahunnya 100%. Dimana rumusan perhitungan untuk mencapai target capaian dimaksud adalah jumlah Total Warga Negara yang harus di layani di bagi dengan Jumlah Warga Negara yang Terlayani di Kali 100%. Jumlah Warga Negara yang harus di layani merupakan hasil patroli dilapangan, aduan dari masyarakat dan hasil penyelidikan dan penyidikan. Adapun penunjang capaian indikator Persentase Pencapaian Terhadap layanan dasar tersebut yaitu :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)
2. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)
3. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)
4. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)
5. Standar sarana prasarana Satpol PP jumlah dan kualitas barang dan jasa : (a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)

4.1 Analisis Capaian Kinerja 2024 Terhadap Target Nasional (SPM)

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terhadap Standar Nasional Tahun 2024 adalah Jumlah Warga Negara yang harus di layani sebanyak 8000 Orang dan Jumlah warga Negara yang terlayani sebanyak 8000 Orang dengan Capaian Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar 100% dari target Nasional tahun 2024 Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar sebesar 100%, Rincian Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terhadap Standar Nasional 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

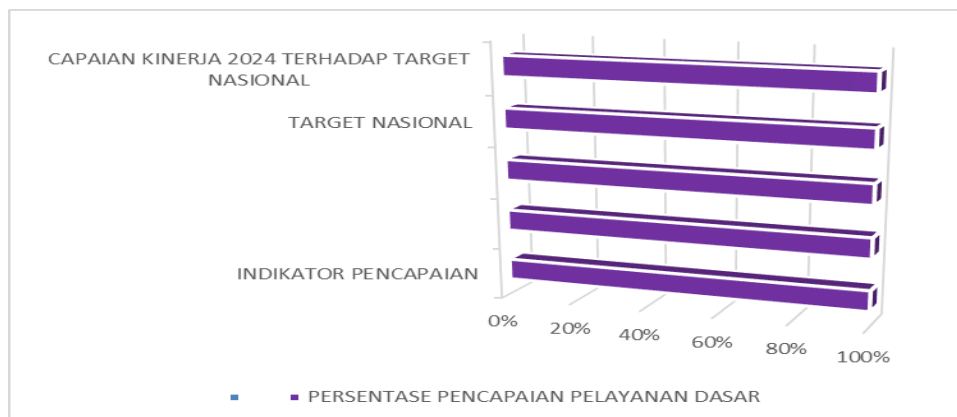
Tabel 3.6
Capaian Kinerja Utama Terhadap Target Nasional (SPM)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
Tahun 2024

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM	INDIKATOR	INDIKATOR PENCAPAIAN			TARGET NASIONAL	CAPAIAN KINERJA 2024 TERHADAP TARGET NASIONAL
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENCAPAIAN PELAYANAN DASAR	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel.III.7.Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap Target Nasional 2024 (SPM)

Perbandingan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2024 terhadap Standar Nasional Tahun 2024 dapat di lihat pada gambar diagram di bawah ini:

Gambar.3.4.
Gambar Diagram Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Utama 2024 terhadap target Nasional Tahun 2024



Gambar Diagram perbandingan Capaian Kinerja 2024 Terhadap Target Capaian Nasional Tahun 2024

Capaian Akhir Standar Pelayanan Minimal (SPM 2024) tergambar dalam Laporan E SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja 2024 dapat di lihat pada SS E SPM 2024 sebagai berikut:

Gambar.3.5.
Gambar SS Perbandingan capaian SPM trantibum satpol PP target Nasional (SPM) Tahun 2024

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						100.00 %
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%)	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	8000	8000	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					(20%)	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						100.00 %
1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)		Unit	237	237	0	100.00 %
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Tibumtramas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)		Dokumen	5	5	0	100.00 %
Data Dukung : 6311-202409030201566SOP (Patroli Pengawasan Wilayah).pdf Status : Approved						
Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
						Simpan Batal / Kembali

Gambar SS Capaian SPM Trantibum Satpol PP 2024 terhadap Target Nasional SPM Trantibum 2024

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Pencapaian Sasaran

5.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Pencapaian Sasaran I (Satu)

menurunnya pelanggaran Perda

1. Sasaran menurunnya pelanggaran Perda Indikator sasaran Persentase pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti .Sumber data yang digunakan di dalam formulasi penghitungan indikator kinerja tersebut adalah Pelanggaran Perda yang di tidaklanjuti terhadap jumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun dari hasil operasi yustisi dan non yustisi, dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Balangan. Memperhatikan capaian

kinerja yang telah tercapai 100% terhadap target, menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan program penyelesaian pelanggaran perda dan perkara dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi faktor-faktor pendorong, diantaranya adanya sinergitas koordinasi dengan stakeholder terkait termasuk aparat penegak peraturan lainnya (Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan TNI serta mitra kerja). Penguatan kapasitas SDM dalam jabatan fungsional Pol PP memberikan pengaruh positif terhadap optimalisasi, profesionalitas, dan produktifitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak perda dan perkara. Terbentuknya jiwa korsa petugas Pol PP juga berpengaruh terhadap kinerja penegakan perda dan perkara menjadi lebih solid. Adapun permasalahan yang masih ditemukan dalam pencapaian program diantaranya :

1. Masih perlunya optimalisasi koordinasi dengan OPD teknis, terkait jenis penegakan perda yang fungsi tindakan preventif yang diampu oleh OPD teknis (pengampu perda)
2. sarpras pendukung kegiatan penegakan perda yang masih belum dapat terakomodir (kendaraan operasional, peralatan penertiban pelanggaran)
3. banyaknya peraturan daerah yang harus dikawal dan perlu ditegakkan tidak sebanding dengan jumlah SDM ideal petugas Pol PP sehingga menjadi kurang optimal dalam pelaksanaan penegakannya
4. Terkadang terdapat ketentuan di dalam peraturan yang membatasi ruang gerak ketugasan Satpol PP dalam melaksanakan optimalisasi penegakan perda.
5. kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan perda
6. Keadaan yang dinamis di lapangan yang dapat mempengaruhi kebijakan penegakan perda (kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat).

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan melalui upaya:

1. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dengan OPD Pengampu Perda terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran perda oleh masyarakat sekaligus segera dicari solusi permasalahan sehingga penegakan perda dapat lebih efektif pada strategi penegakan secara preventif.

2. Perencanaan kebutuhan sarpras prioritas pendukung kegiatan penegakan perda ke dalam dokumen penganggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
3. Peningkatan profesionalisme petugas dalam jabatan fungsional Pol PP melalui kegiatan pengembangan kapasitas SDM baik secara fisik maupun pengetahuan pendukung ketugasan Penegakan Perda.
4. Mengoptimalkan strategi penegakan perda secara preemtif melalui Gerakan Tertib dan secara preventif melalui fungsi petugas patroli pengamanan tertutup.
5. mengoptimalkan peran dan fungsi petugas Bawah Kendali Operasi (BKO) Pol PP di wilayah Kabupaten Balangan.
6. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal melalui Forkompimda dalam mengurangi pelanggaran perda dan perkara.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis Menurunnya Pelanggaran Perda Dengan Indikator Sasaran Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti telah tercapai 100 % dari jumlah pelanggaran Perda sebanyak 18 kasus dan di tindak lanjuti sebanyak 18 kasus dengan capaian 100% dari target kinerja 100% namun terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.7. Capaian Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	REALISASI KINERJA 2024			REALISASI ANGGARAN 2024			CAPAIAN EFISIENSI ANGGARAN 2024	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di Tindak Lanjuti	100%	100%	100%	21.223.734.657	20.034.069.330	94,39	1.189.665.327	5,61

Di lihat dari Capaian dari realisasi anggaran tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 20.034.069.330,- jika di dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp. 21.223.734.657 dengan Capaian 94.39% sehingga di dapatkan efesiensi penggunaan anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 1.189.665.327,- jika dibandingkan dengan target anggaran 2024 sebesar Rp. 21.223.734.657 dengan capaian efisiensi sebesar 5,61%.

Secara efisiensi anggaran, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Menurunnya Pelanggaran Perda, telah sesuai target dengan efisiensi anggaran sebesar 5,61% yang diperoleh dari selisih tingkat capaian kinerja sasaran menurunnya pelanggaran perda 100, dan penyerapan anggaran sebesar 94,39% dari total anggaran.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Memperhatikan capaian indikator program yang menjadi komposit pendukung capaian kinerja sasaran strategis, capaian realisasi sasaran indikator program rata-rata telah memenuhi target yang ditentukan yang telah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya, diantaranya terdapat evaluasi internal kegiatan menyesuaikan capaian tahun sebelumnya

kegiatan. Selain itu konsep kegiatan dilaksanakan lebih interaktif dan lebih dinamis sehingga motivasi pegawai dalam mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM meningkat. Koordinasi yang efektif di internal bidang juga mempengaruhi pola koordinasi dan kerjasama yang mendukung capaian kinerja lebih optimal.

7.1 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian Kinerja sasaran menurunnya pelanggaran perda Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE TERBENTUKNYA KELOMPOK BUDAYA MASYARAKAT TAAT PERDA	100%	100%	100%

pelaksanaan indikator program persentase terbentuknya kelompok budaya masyarakat taat perda tidak terlepas dari pelaksanaan sosialisasi perda dan perkara yang dilakukan melalui media sosial, melalui radio, melalui sosialisasi pada kelompok kelompok masyarakat terutama pada daerah rawan terjadinya pelanggaran perda dan ke sekolah sekolah terutam lanjutan tingkat pertama dan lanjutan tingkat Atas di mana rawan kenakalan

remaja di jalanan. selain itu penyelesaian pelanggaran perda dan perkara dapat berjalan secara optimal juga dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adanya sinergitas koordinasi dengan stakeholder terkait termasuk aparat penegak peraturan lainnya (Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan TNI serta mitra kerja). Foto Kegiatan dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Foto kegiatan Sosialisasi Perda



Foto Kegiatan pengawasan Perda dan Perkada



B. Sasaran II (Dua) Menurunnya Gangguan Trantibum

1. Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja 2024

Pada sasaran Strategis menurunnya gangguan trantibum dengan Indikator kinerja Persentase Penurunan gangguan Trantibum pada tahun 2024 dengan Realisasi sebesar 11,11% dari target Kinerja 10% seperti di sajikan padea perhitungan di bawah ini :

1. .Indikator Persentase penurunan gangguang Trantibum

$$\begin{aligned} &= \frac{juliah\ kasus\ (n-1) - JumlahKasus\ (n)}{Jumlah\ Kasus\ (n)} \times 100\% \\ &= \frac{60-54}{54} \times 100\% \\ &= 11,11\% \end{aligned}$$

1.2. Analisis Capaian Kinerja 2024 Terhadap Target Kinerja 2024

Untuk sasaran Menurunnya Gangguan Trantibum dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Gangguan Trantibum adalah sebesar 11,11% dari sebanyak 54 Kasus Pelanggaran Trantibum tahun ini (n) dan pelanggaran Trantibum Tahun Lalu (n-1) sebanyak 60 kasus dengan capaian 11,11% dari Target Kinerja sebesar 10% dengan Capaian 111,10%.

Rincian Capaian Realisasi Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 terhadap Taget Kinerja Satuan Polisi pamong Praja 2024 untuk sasaran menurunnya gangguan Trantibum dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

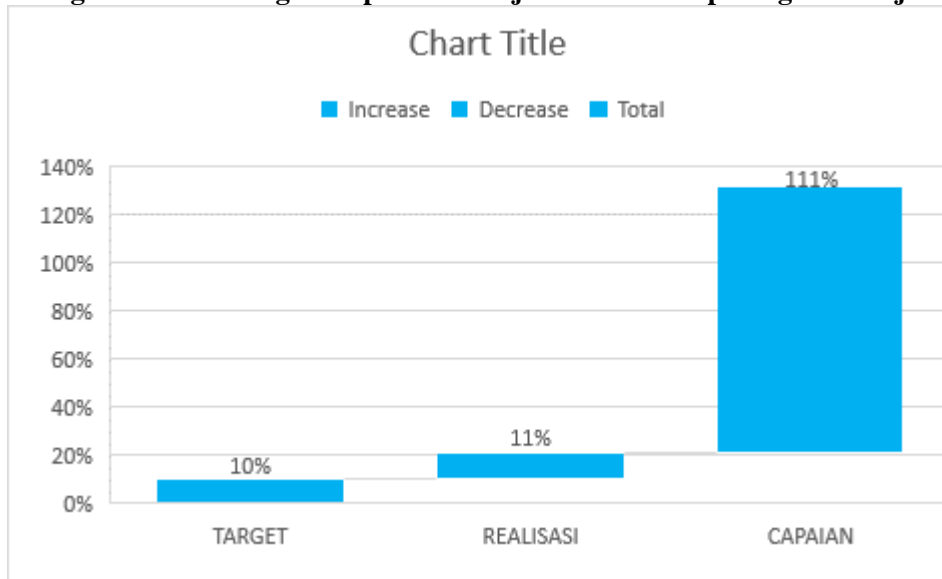
Tabel.3.8.
Perbandingan Capaian Kinerja Utama 2024 terhadap Target Kinerja 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menurunnya Gangguan Trantibum	Perserntase Penurunan Gangguan Trantibum	10%	11,11%	111,10%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap target kinerja 2024

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 terhadap Taget Kinerja Satuan Polisi pamong Praja 2024 untuk sasaran menurunnya gangguan Trantibum dapat di lihat pada diagram di bawah ini :

Gambar 3.6
Gambar Diagram Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap Target Kinerja 2024



Gambar Diagram Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap target Kinerja 2024

2. Capaian Kinerja 2024 terhadap Capaian Kinerja 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap capaian kinerja Tahun 2023 untuk sasaran menurunnya Gangguan Trantibum dengan Indikator Persentase Penurunan Gangguan Trantibum di sajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel.3.9.
Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap capaian Kinerja 2023

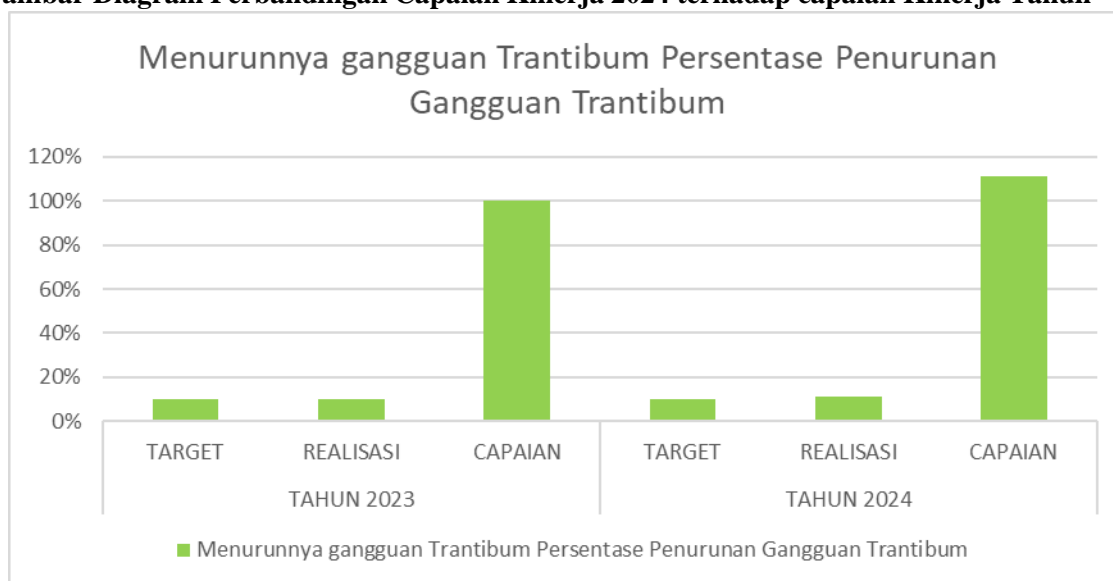
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menurunnya gangguan Trantibum	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	10%	10%	100%	10%	11%	111%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap capaian Kinerja 2023

Perbandingan Capaian Kinerja (Sasaran II) 2024 terhadap capaian kinerja 2023 dapat di lihat pada Grafik di bawah ini:

Gambar.3.7.

Gambar Diagram Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap capaian Kinerja Tahun



2.1. Analisis capaian Kinerja 2024 terhadap capaian Kinerja 2023

Sasaran menurunnya gangguan Trantibum dengan Indikator Persentase Penurunan Gangguan Trantibum formulasi penghitungan indikator kinerja tersebut adalah Jumlah kasus gangguan Trantibum Tahun berjalan (n) sebanyak 54 Kasus pelanggaran Trantibum dan 60 kasus pelanggaran Trantibum pada tahun lalu (n-1) dengan capaian 11,11% dari Target Kinerja Sebesar 10% dengan capaian Kinerja sebesar 111,10%, untuk tahun 2023 terdapat sebanyak 60 Kasus pelanggaran Trantibum pada tahun Berjalan (n) dan 66 kasus pelanggaran Trantibum pada tahun lalu (n-1) dengan capaian 10% dari Target Kinerja Sebesar 10% dengan capaian Kinerja sebesar 100%, terjadi peningkatan Capaian sebanyak 11,10% dan penurunan gangguan Trantibum sebanyak 6 Kasus.

3. Capaian Kinerja 2024 Terhadap Target RENSRA 2021-2026

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Gangguan Trantibum terhadap target Akhir Renstra tahun 2021-2026 dapat di lihat pada table di bawah ini:

Tabel.3.10.
Perbandingan Capaian Kinerja Utama 2024 terhadap target akhir Renstra (2021-2026)

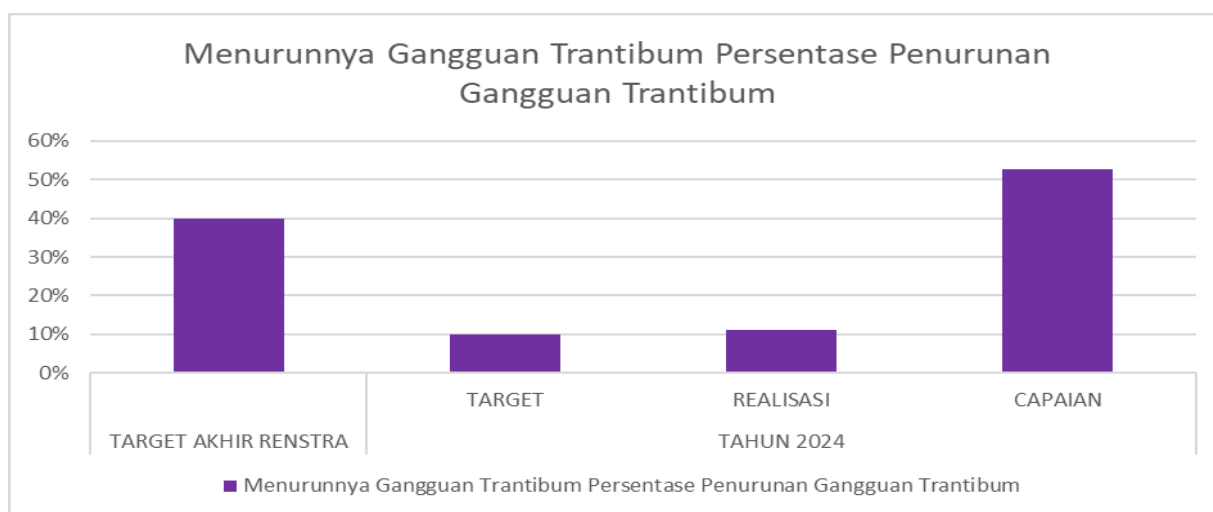
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menurunnya Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	40%	10%	11,11%	52,77%

3.1 Analisis Capaian Kinerja 2024 Terhadap Capaian akhir Renstra 2021-2026

Sasaran menurunnya gangguan Trantibum dengan Indikator persentase Penurunan gangguan Trantibum adalah sebanyak 54 kasus pelanggaran Trantibum di tahun ini (n) dan terdapat pelanggaran Trantibum sebanyak 60 kasus di tahun lalu (n-1) dengan capaian 11,11% di tambah capaian penurunan gangguan trantibum tahun 2023 sebesar 10% dengan perhitungan kumulatif sebesar 21,11% dari target akhir Renstra sebesar 40% dengan capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 52,77%.

Perbandingan Capaian Kinerja sasaran menurunnya gangguan Trantibum Tahun 2024 terhadap target akhir renstra (2021-2026) dapat di lihat pada Grapafik di bawah ini:

Gambar.3.8.
Gambar Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Utama 2024 terhadap target akhir renstra (2021-2026)



Gambar Diagram Capaian Kinerja Utama 2024 terhadap target akhir renstra 2021-2026

4. Realisasi Kinerja 2024 terhadap Target Nasional (SPM)

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terhadap Standar Nasional Tahun 2024 pada mutu layanan dasar adalah sebesar 20% dari terget Nasional (SPM) sebesar 20% dengan capaian Kinerja sebesar 100% Rincian Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Balangan pada indikator Persentase Mutu layanan dasar terhadap Standar Nasional 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Utama Terhadap Target Nasional (SPM)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
Tahun 2024

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM	INDIKATOR	INDIKATOR PENCAPAIAN			TARGET NASIONAL	CAPAIAN KINERJA 2024 TERHADAP TARGET NASIONAL
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE MUTU PELAYANAN DASAR	20%	20%	100%	20%	100%

4.1 Analisis Capaian Kinerja 2024 terhadap target Nasional (SPM) 2024

Persentase Mutu Pelayanan dasar SPM dengan target Kinerja Nasional sebesar 20% terdiri dari beberapa mutu layanan yang harus di penuhi untuk mencapai target 20% tersebut, diantara mutu layanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balnagan tahun 2024 tersebut terdiri dari :

1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara dengan target kinerja 237 Unit realisasi 237 Unit dengan capaian 100%.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara dengan target 5 Dokumen dan terealisasi sebanyak 5 Dokumen dengan Capaian 100%.
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM dengan target 2539 Orang dengan realisasi kinerja 2359 Orang sehingga memperoleh Capaian sebesar 100%.
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal realisasi 1 Dokumen dari Target kinerja 1 Dokumen dengan Capaian 100%.

Gambaran Mutu Pelayanan Dasar Dinas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terhadap Target Nasional SPM dapat di lihat Pada SS pada aplikasi E SPM di bawah ini:

Gambar.3.9.
Gambar SS capaian SPM Satpol PP terhadap target Nasional (SPM) Tahun 2024

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					
1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlongkaran perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, pedang sambar, perlengkapan operasional)	Unit	237	237	0	100.00 %
2. Standar Operasional Procedure (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Tiba/Tranmases, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	5	5	0	100.00 %
Data Dukung : 6111-2024000001153000 (Pembeli Programmes, Melayani) per Status : Ajornan					
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satfimas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDN*** (jumlah dan kualitas personel/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/SatSimas)	Orang	2539	2539	0	100.00 %
4. Standar pelayanan yang terencana dampak gangguan Trantibum akibat pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan pemangku daerah yang membina kedisiplinan, aset, pekerjaan umum, perumahan pemukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %
Data Dukung : 6111-2024000001153000 (Pembeli Programmes, Melayani) per Status : Ajornan					
5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materi (kemungkinan akibat pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (perlindungan pertama yang terencana cidersa Riik ringan akibat pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan masalah ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkenca cidersa Riik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %

Gambar SS Capaian SPM Satpol PP 2024 terhadap Target Nasional SPM Trantibum 2024

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Pencapaian Sasaran

Sumber data yang digunakan di dalam formulasi penghitungan sasaran menurunnya gangguan trantibum dengan indikator persentase penurunan gangguan trantibum tersebut adalah Jumlah kasus gangguan Trantibum tahun lalu (n-1) di kurangi Jumlah Kasus gangguan trantibum tahun berjalan (n) di bagi kasus pelanggaran tahun berjalan (n)

kegiatan pengendalian potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap adanya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Potensi gangguan tersebut teridentifikasi dari adanya event atau kegiatan di Kabupaten Balangan, baik yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan ataupun kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selain itu pengendalian juga dilakukan terhadap potensi gangguan ketertiban umum akibat dugaan pelanggaran perda dan perkara yang terjadi di masyarakat. Pengendalian potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban dilakukan melalui kegiatan pengawasan, deteksi dan cegah dini, dan pengamanan, baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup melalui petugas intelijen Pol PP. Selain itu Satpol PP juga memberikan fasilitasi dan inisiasi adanya mediasi kepada masyarakat apabila terdapat perselisihan antar warga terkait dugaan adanya pelanggaran peraturan daerah dan gangguan yang mengancam ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan kegiatan pengendalian gangguan trantibum ini, diharapkan meminimalisasi terjadinya konflik yang lebih meluasi di dalam masyarakat.

Ketercapaian target di dalam program ini ditentukan oleh beberapa hal, seperti optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal (TNI dan Kepolisian) dalam pengamanan kegiatan dan event, ketersediaan SDM yang mencukupi, dan dukungan dari pemangku kebijakan dalam hal cipta kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat Kabupaten Balangan. Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan ketugasan diantaranya adalah kurangnya pelatihan teknis terkait kegiatan intelijen/ deteksi dan cegah dini untuk petugas pengamanan tertutup

dan pemantauan dalam rangka pencegahan potensi konflik dan pengendalian gangguan Trantibum..

Petugas intelijen sebenarnya telah terdistribusi secara ideal, tetapi untuk petugas pengamanan tertutup membutuhkan kemampuan khusus, jumlah sekitar 3/4 orang, untuk pengawasan 1 daerah masih kurang. Selain itu juga keadaan yang dinamis di lapangan yang dapat mempengaruhi terjadinya potensi konflik yang lebih besar (kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat), sebagai contoh maraknya isu kenakalan remaja di jalanan merupakan masalah yang kompleks dipengaruhi dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Alternatif solusi permasalahan yang telah dilakukan untuk meminimalisasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Pengusulan diklat teknis intelijen kepada OPD pengampu pengembangan kapasitas pegawai
2. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal melalui Forkompimda dalam meminimalisasi terjadinya gangguan tibuntranmas yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat
3. Melaksanakan patroli pengamanan wilayah di daerah terindikasi rawan pelanggaran Perda

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran strategis Menurunnya Gangguan Trantibum Dengan Indikator Sasaran Persentase Penurunan Gangguan Trantibum telah tercapai 11,11 % dari target Kinerja sebesar 10% dengan capaian 111,10% namun terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.12. Capaian Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	REALISASI KINERJA 2024			REALISASI ANGGARAN 2024			CAPAIAN EFISIENSI ANGGARAN 2024	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	Menurunnya Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	10%	10%	111,10%	21.223.734.657	20.034.069.330	94,39	1.189.665.327	5,61

Di lihat dari Capaian dari realisasi anggaran tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 20.034.069.330,- jika di bandingkan dengan target anggaran sebesar Rp. 21.223.734.657 dengan Capaian 94.39% sehingga di dapatkan efesiensi penggunaan anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 1.189.665.327,- jika dibandingkan dengan target anggaran 2024 sebesar Rp. 21.223.734.657 dengan capaian efisiensi sebesar 5,61%.

Pada tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan melakukann reuiu Anggaran dan Kegiatan dalam rangka optimalisasi dan efisiensi Kinerja terhadap anggaran Tahun 2024, dari hasil reuiu tersebut di putuskan untuk melakukan pergeseran anggaran pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan “Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum” sebesar Rp,320.380.000 (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) di

karenakan pada sub kegiatan tersebut ada beberapa kegiatan pelatihan pemilu yang di akomodir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten balangan.

Dalam rangka menciptakan kondusifitas Daerah Kabupaten Balangan Menjelang Pemilu, natal dan tahun baru maka untuk menunjang kegiatan tersebut di lakukan kegiatan pengamanan wilayah berupa patroli gabungan cipta kondisi Bersama TNI/Polri dan Ormas lainnya, maka di pandang perlu penambahan Anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran tersebut ke dalam sub kegiatan “Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan”

Pergeseran anggaran dalam rangka mengoptimalkan Kinerja dan mengefisienkan Anggaran pada Dinas satuan Polisi Pamong Praja dapat di lihat pada table di bawah ini:

Pergeseran anggaran dalam rangka mengoptimalkan Kinerja dan mengefisienkan Anggaran pada Dinas satuan Polisi Pamong Praja dapat di lihat pada table di bawah ini:

PERGESERAN ANGGARAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2024				
No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN OERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.021.214.200	1.700.834.200	-320.380.000
2	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	6.030.607.670	6.373.735.490	320.380.000

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian Kinerja sasaran menurunnya gangguan trantibum Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE ANGGOTA SATLINMAS YANG DI TINGKATKAN KAPASITASNYA	100%	100%	100%
		PERSENTASE SDM SATPOLPP YANG TERDIDIK DAN TERLATIH	80%	80%	100%
		JUMLAH KEGIATAN PENANGANAN TRANTIBUM	750 Kegiatan	750 Kegiatan	100%

Program yang menunjang keberhasilan dari sasaran menurunnya Gangguan Trantibum dengan indikator kinerja sasaran persentase penurunan Gangguan Trantibum adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di dukung Oleh 3 (Tiga) Indikator Kinerja Program yang terdiri dari :

1. Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya
2. Persentase SDM Satpol PP yang terdidik dan Terlatih
3. Jumlah Kegiatan Penanganan Trantibum

7.1 Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Indikator Persentase Anggota satlinmas yang di tingkatkan kapasitasnya

Capaian realisasi kinerja pada Indikator program persentase anggota satlinmas yang di tingkatkan kapasitasnya tersebut telah memenuhi target yang ditentukan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya masih tingginya animo masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dilihat dari keanggotaan linmas yang menunjukkan angka yang relatif memadai sebanyak 2355 orang yang tersebar di 157 desa dan Kelurahan. Begitu juga keterlibatan masyarakat melalui Kegiatan Poskamling dalam rangka menurunkan gangguan Trantibum di lingkungan masyarakat . hal itu di tunjukan dengan adanya peningkatan jumlah keamanan dan ketertiban lingkungan yang di fasilitasi oleh anggota satlinmas desa dan kelurahan yang telah di tingkatkan kapasitasnya melalui sosialisasi dan pembinaan anggota satlinmas Desa dan Kelurahan. Koordinasi yang baik dan efektif dengan masyarakat dan stakeholder (TNI/POLRI, Camat, Kepala Desa, narasumber, Anggota Satlinmas) menjadi faktor utama keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini. Selain itu pelaksanaan pengembangan kapasitas anggota Satlinmas dalam upaya meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan ketugasan linmas. Komitmen Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam menumbuhkan pengaruh positif terhadap keberlanjutan program dimaksud. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam mencapai program perlindungan masyarakat diantaranya masih rendahnya tingkat pendidikan SDM Anggota Satlinmas Desa dan Kelurahan.

Berikut Foto kegiatan Pembinaan Anggota satlinmas Desa dan kelurahan:



7.2 Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Indikator Persentase SDM Satpol PP yang terdidik dan terlatih

Capaian Indikator program persentase SDM Satpol PP yang terdidik dan terlatih pada program ini diketahui bahwa untuk realisasi komposit pendukung indikator program pada kegiatan peningkatan kapasitas melalui peningkatan pengetahuan kesamaptaaan dan pemahaman peraturan perundang-undangan telah mencapai target yang ditentukan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian realisasi mencapai target yang ditentukan, diantaranya terdapat evaluasi internal kegiatan menyesuaikan capaian tahun sebelumnya dengan kondisi eksisting dan dinamisasi kegiatan dalam Penurunan gangguan trantibum. Selain itu konsep kegiatan dilaksanakan lebih interaktif dan lebih dinamis dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM sehingga motivasi pegawai dalam mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM meningkat. Koordinasi yang efektif di internal bidang juga mempengaruhi pola koordinasi dan kerjasama yang mendukung capaian kinerja lebih optimal.

Berikut ini foto kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP:





7.3 Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Indikator Jumlah Kegiatan Peningkatan Keteneteraman dan Ketertiban Umum

Pengendalian potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban dilakukan melalui kegiatan pengawalan, deteksi dan cegah dini, dan pengamanan, baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup melalui petugas intelijen Pol PP. Selain itu Satpol PP juga memberikan fasilitasi dan inisiasi adanya mediasi kepada masyarakat apabila terdapat perselisihan antar warga terkait dugaan adanya pelanggaran peraturan daerah dan gangguan yang mengancam ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan kegiatan pengendalian gangguan tibumtranmas ini, diharapkan meminimalisasi terjadinya konflik yang lebih meluasi di dalam masyarakat. Ketercapaian target di dalam program ini ditentukan oleh beberapa hal, seperti optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal (TNI dan Kepolisian) dalam pengamanan

Foto kegiatan penanganan gangguan Trantibum dapat di lihat pada gambar di bawah ini :







C. SASARAN STRATEGIS MENURUNNYA GANGGUAN TRANTIBUM

1. Capaian Kinerja 2024 terhadap target Kinerja 2024

B. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 21.223.734.657 dengan Realisasi Rp.20.034.069.330,- dengan Capaian 94,39% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran perprogram, penyerapan anggaran terbesar pada program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 10.127.463.657 dari target sebesar Rp. 11.013.201.417 dengan Capaian 91,96% Sedangkan penyerapan terkecil di sasaran pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.9.906.605.673,- dari Target Sebesar Rp.10.210.533.240 dengan Capaian 97,02%.

hal ini dikarenakan rendahnya realisasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, diantaranya disebabkan oleh terdapatnya jabatan yang masih kosong/belum terisi, terdapat pegawai yang di mutasi dan pension, Secara rinci tersaji dalam tabel berikut ini :

CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	74.40 Nilai Sakip	76.67 Nilai Sakip	103.05%	11.013.201.417	10.127.463.657	91,96	885.737.760
1	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	248.857.000	237.085.296	95,27	11.771.704
1.a.	Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	131.414.500	121.156.696	92,19	10.257.804
1.b.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	41.302.500	40.876.000	98,97	426.500
1.c.	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100%	76.140.000	75.052.600	98,57	1.087.400
2	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	7.979.873.187	7.249.176.566	90,84	730.696.621
2.a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40/14	40/14	100%	7.979.873.187	7.249.176.566	90,84	730.696.621
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	1.355.212.000	1.335.542.256	98,55	19.669.744
3.a.	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	40 Orang	40 Orang	100%	945.932.000	926.792.420	97,98	19.139.580
3.b.	Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan	40 Orang	40 Orang	100%	409.280.000	408.749.836	99,87	530.164
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	367.858.100	361.519.382	98,28	6.338.718
4.a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	100%	53.880.600	53.245.541	98,82	635.059
4.b.	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	12 Paket	100%	21.547.500	21.521.000	99,88	26.500
4.c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 Paket	12 Paket	100%	8.500.000	8.010.000	94,24	490.000
4.d.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	283.930.000	278.742.841	98,17	5.187.159
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	100%	100%	100%	636.686.380	603.819.820	94,84	32.866.560

5.a	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 Unit	3 Unit	100%	636.686.380	603.819.820	94,84	32.866.560
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	100%	134.813.900	84.210.508	62,46	50.603.392
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	100%	289.900.850	256.109.829	87,45	33.766.021
7.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45 Unit	45 Unit	100%	269.150.850	235.384.829	87,45	33.766.021
7.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81 Unit	81 Unit	100%	20.750.000	20.725.000	99,88	25.000
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	750 Kegiatan 80% 100% 100%	750 Kegiatan 80% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	10.210.533.240	9.906.605.673	97,02	303.927.567
1	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	60 Kasus 20 Orang 80% 2355 Orang	60 Kasus 20 Orang 80% 2355 Orang	100% 100% 100% 100%	9.596.123.240	9.320.278.273	96,52	275.844.967
1.a.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawasan	18 laporan	18 laporan	100%	6.373.735.490	6.151.896.120	96,52	221.839.370
1.b.	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	1.700.834.200	1.684.095.196	99,02	16.739.004
1.c.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	20 Orang	20 Orang	100%	818.808.500	811.686.513	99,13	7.121.987
1.d	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	136.439.500	129.081.444	94,61	7.358.056
1.e	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	13 Unit	13 Unit	100%	566.305.550	543.519.000	95,98	22.786.550
2	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	24 Perda 10 Kasus	24 Perda 10 Kasus	100% 100%	614.410.000	586.327.400	95,43	28.082.600
2.a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8 laporan	8 laporan	100%	208.110.000	204.055.200	98,05	4.054.800
2.b	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 Laporan	24 Laporan	100%	406.300.000	382.272.200	94,09	24.027.800

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan Penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai Program / kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			REALISASI ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di Tindaklanjuti	100%	100%	100%	21.223.734.657	20.034.069.330	94,39%
2	Menurunnya gangguan Trantibum	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	10%	11,11%	111,10%			

C. KINERJA LAINNYA

A. Kinerja lainnya yang mendukung sasaran menurunnya gangguan Trantibum

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi kinerja yang berorientasi hasil mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal terkait dengan urusan, tugas, dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja. Berikut adalah inovasi Satpol PP Kabupaten Balangan :

1. LAYANAN ADUAN ONLINE WHATSHAPP (LA-LISA)

LALISA adalah bagian dari Inovasi Daerah Balangan (Bailang) yang di pelopori oleh satuan polisi pamong Praja dalam Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat. Perubahan yang di hasilkan / di capai dalam keseluruhan populasi yang di rasa menjadi sasaran di rasa masih sedikit di karenakan kondisi pelanggaran Perda dan Perkada maupun gangguan Kamtibmas tergolong rendah di kabuipaten balangan, Namun Layanan Inovasi “ LA-LISA” Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat terus di jalankan dan di aktifkan, dengan harapan masyarakat tetap terlayani dengan semua pelayanan tersebut.

Dengan Layanan Lalisa tersebut terjadi perubahan yang sangat signifikan yaitu tersedianya layanan online yang mudah untuk di akses oleh masyarakat, penyajian data laporan aduan layanan menjadi lebih mudah karena bersumber pada aduan yang ada pada program inovasi Lalisa, dimana admin dengan mudah admin merekapitulasi aduan yang sudah tertangani, kemudian data pelapor sebagai bahan pertanggungjawaban program apabila di butuhkan juga bisa

di sajikan secara internal mengacu pada jaminan kerahasiaan pelapor.

Dampak positif yang bias dirasakan dari Inovasi ini adalah kepuasan masarakat di mana masyarakat yang di layani dengan Inovasi La-lisa ini mengungkapkan kepuasannya melalui hasil survey kepuasan Masyarakat. Hal tersebut dapat di lihat dari keseharian warga masyarakat balangan yang merasakan ketenteraman dan keaaman serta rasa nyaman dalam melaksanakan aktifitas sehari hari di semua aspek kehidupan masyarakat baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dll.

Sampel Kepuasan Masyarakat terhadap Inovasi La- Lisa dapat di lihat dari hasil survey sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		CAPAIAN			
		L	P	TIDAK PUAS	CUKUP PUAS	PUAS	SANGAT PUAS
1	PARINGIN	35	15	0	2	5	43
2	PARINGIN SELATAN	20	30	0	4	6	40
3	BATUMANDI	27	23	0	2	7	41
4	LAMPIHONG	31	19	0	3	4	43
5	JUAI	24	26	0	1	5	44
6	HALONG	19	31	1	3	3	43
7	AWAYAN	30	20	0	2	4	44
8	TEBING TINGGI	25	25	1	4	3	42
JUMLAH		211	189	2	21	37	340

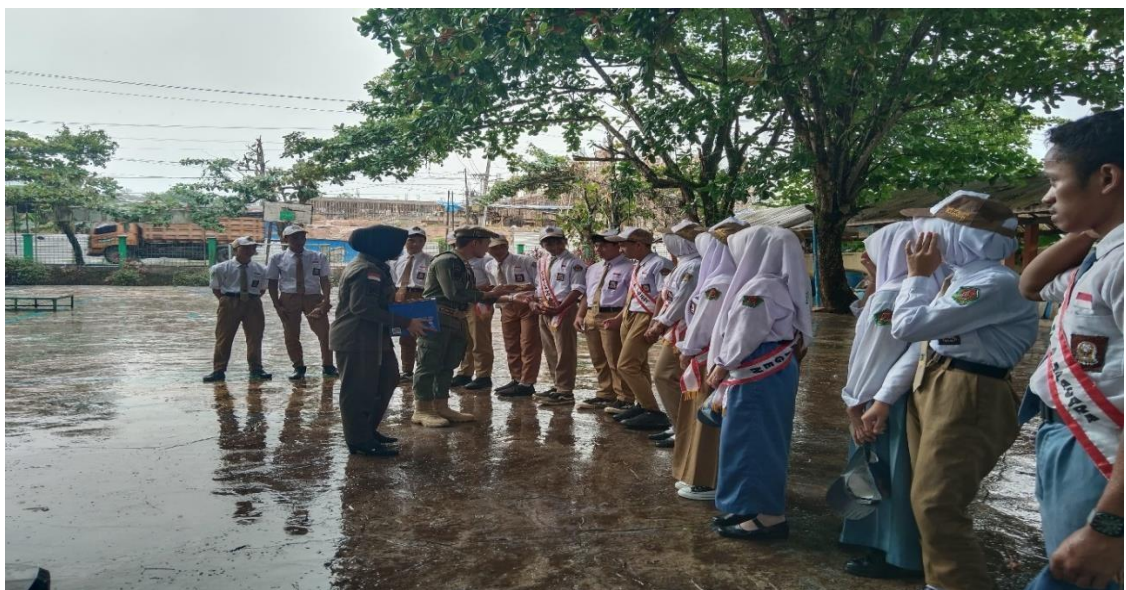
Anggaran Inovasi La – Lisa ini di ambil dari Kegiatan Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, dengan memanfaatkan Sarana prasarana yang tersedia seperti Smartphone laptop dan mengambil sebagian anggaran makan minum rapat dari sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

2. SPARCO

Sparco merupakan Akronim dari kata “Satuan Polisi Pamong Praja Rollinf To School, yaitu kegiatan yang di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pengenalan , Sosialisasi Perda sekaligus Pembinaan Mental dan Fisik kepada Pelajar, Pelaksanaan Sparco di latarbelakangi oleh buah pemikiran di mana marak pelanggaran Perda yang terjadi di kalangan Pelajar, dimana di pandang perlu penegnaln tentang Perda yang berlaku sejak dini, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten balangan sebagai Penegak Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA).

Kegiatan Sparco tersebut di lakukan dengan berbagai media, yaitu:

1. Melalui Atraksi bela diri dengan tujuan agar anak memiliki bekal bela diri untuk melindungi dirinya dari bermacam gangguan kejahatan dan atraksi tersebut di selingi dengan permainan Drumband agar lebih menarik .
2. Penjelasan singkat tentang pentingnya ketenteraman dan ketrtiban umum dalam kehidupan sehari hari.
 - A. Pengenalan Peraturan daerah yang di kemas melalui permainan dan Tanya jawab tebak perda dengan di iringi dengan music drumband serta hadiah hiburan sebagai stimulus kepada Siswa peserta Sparco.Foto kegiatan Sparco dapat di lihar pada gambar di bawah ini:



Anggaran Inovasi SPARCO ini di ambil dari Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Kepala Daerah bupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, dengan memanfaatkan Sarana prasarana yang tersedia seperti Drumband, laptop dan mengambil anggaran dari sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Rincian Realisasi dan Capaian Kegiatan Sebagai berikut:

Dengan Realisasi Kinerja Sebanyak 500 Orang Peserta dari Target Kinerja Sebanyak 500 Orang dengan Capaian 100%, realisasi Keuangan sebesar Rp.46.200.000,- dari target kinerja sebesar Rp.46.800.000,- dengan capaian 98,72% dengan efisiensi Anggaran sebesar Rp 400.000,-

3. TRECKK (Tim Reaksi Cepat Ketenetraman dan Ketertiban Umum)

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan membentuk Tim Reaksi Cepat ini dengan tujuan perluasan jangkauan Pelayanan dengan cepat dan mudah menjangkau lokasi terjadinya Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka peningkatan Layanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Balangan.

Tugas dari Tim Reaksi Cepat (Treckk) ini adalah melakukan Operasional penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perluasan pemantauan keamanan dan ketertiban umum masyarakat secara menyeluruh ke semua Kecamatan dan Desa yang ada di kabupaten Balangan.

Tim Reaksi Cepat Ketenetaraman dan ketertiban umum ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Anggota satlinmas desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Balangan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menjaga keaman dan ketertiban di libgkungan masyarakat kabupaten Balangan.

Keberadaan anggota Treckk ini di sambut baik Oleh Masyarakat, dan sangat di apresiasi oleh seluruh camat yang ada di kabupaten Balangan dengan memrintahkan Desa dan Kelurahan untuk membangun Sinergisitas dengan Anggota satlinmas desa dan kelurahan demi terciptanya kabupaten Balangan yang aman dan nyaman dan tenteram , tentunya menarik untuk di kunjungi sehingga menarik Investor untuk masuk ke kabupaten Balangan dan UMKM yang ada di

kabupaten Balangan juga akan semakin maju dan Pariwisata di kabupaten Balangan akan menjadi tujuan Wisata yang diperhitungkan .

Sebagian dari Kegiatan Tim Reaksi Cepat Keteneteraman dan Ketertiban umum dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1. Penyisiran Lokasi di Indikasi di jadikan tempat Asusila



Gambar 2.1. Penyisiran Lokasi di Indikasi tempat Minum Minuman Keras



4. Sisbinsik Pol PP (Sistem Pembinaan Mental Fisik) Polisi Pamong Praja

Dalam rangka meningkatkan Sumberdaya Manusia Satpol PP dengan tuntutan tugas dan tanggungjawab yang sangat besar terutama di lapangan, mereka harus mampu bekerja di bawah tekanan yang cukup tinggi, kedisiplinan, kerjasama yang baik dengan rekan kerja, rasa tanggungjawab yang tinggi sudah menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh seorang anggota Pol PP. Peningkatan SDM Satpol PP dilaksanakan Melalui kegiatan-kegiatan rutin instansi yang dibina oleh senior Satpol Pp di SKPD, dampak yang dirasakan dengan adanya kegiatan ini masih sangat kurang, terlihat masih banyaknya anggota satpol PP yang masih kurang disiplin, kurang tanggungjawab bermental loyo dan mudah menyerah. Untuk menambah wawasan anggota pol PP meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, tanggungjawab dan rasa turut memiliki serta mental yang Tangguh dalam melaksanakan tugas sebagai anggota satpol PP dilaksanakanlah Pembinaan Mental dan Fisik (Bintalsik).

Menurunnya disiplin anggota baik disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam melaksanakan giat permasalahan. Pemecahan Masalah Dalam rangka menunjang Satpol PP agar lebih memiliki rasa tanggungjawab atas apa yang pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja maka Dinas Satpol PP Kabupaten Balangan lebih meningkatkan Fisik dan mental Anggota Praja dan Prajawati untuk lebih maksimal kembali dalam berkegiatan. Dibalik menjaga keamanan, ketertiban dalam masyarakat dan juga menunjang kegiatan yang sifatnya lebih berat dari seperti biasanya. Polisi Pamong Praja karena di samping tugas rutin yang harus dilaksanakan sesuai tupoksi Pol PP. Satpol PP juga juga bertugas menjaga pengamanan Kepala Daerah di Kabupaten Balangan. Sehingga banyak upaya yang telah diberikan oleh senior di SKPD untuk mengembalikan semangat, antara lain mengatur jadwal operasional. Maka dari itu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan Pelatihan Pembinaan Mental dan Fisik kembali untuk menunjang semangat kerja Praja dan Prajawati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

1.3. Gambar 2.1. Kegiatan Sisbinsik Pol PP (Sistem Pembinaan Mental Fisik) Polisi Pamong Praja



5. Penghargaan

Pada Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh Penghargaan atas Capaian Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, melalui sistem unformasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dengan nilai 83,85 dalam Kategori **TINGGI** yang di berikan Oleh Bupati balangan pada Tanggal 15 Agustus 2024

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2024				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
No	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Oleh
1	15-Agu-24	Paringin	Pengukuran Indeks Profesional ASN	Bupati Balangan

Piagam Penghargaan tersebut dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



6. Rencana Aksi atas LHE SAKIP tahunan dari Inspektorat

Menindak lanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, maka Dinas satuan Polisi {Pamong Praja Kanupaten Balangan melakukan tindaklanjut terhadap hasil Evaluasi sakip 2023 yang di rekomendasikan oleh Inspektorat kabupaten balangan untuk Peerbaikan Angka (Nilai sakip) tahun berikutnya melalui Rencana Aksi yang di susun Dinas satuan Polisi pamong Praja yang di susun Oleh Tim Evaluasi Sakip satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Balangan dan jajarannya.

Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan pada tahun 2023 memperoleh nilai 76,70 dengan predikat BB (Sangat Baik) mengalami peningkatan sebesar 3,10 dari capaian tahun 2022 sebesar 73,60% dengan predikat BB (sangat Baik) Menurut hasil Evaluasi Inspektorat pada bagian perencanaan Kinerja:

Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memberikan Informasi tentang Hubungan Kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar Bidang dengan Tugas dan Fungsi lain yang berkaitan dengan Crosscutting dan di rekomendasikan Menyempurnakan diagram crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang di jawab dinas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dengan melakukan Penyempurnaan Diagram Crosscutting yang menggambarkan Kesinambungan antar unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja

Aktifitas yang di dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin di capai dan di rekomendasikan untuk Menyesuaikan antara target yang ingin dicapai dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan yang di jawab Dinas satuan Polisi pamong Praja dengan Melakukan Penyesuaian antara Target dengan rencana aksi

Dokumen Evaluasi Kinerja Belum di Legalkan, dan di rekomendasikan agar Dokumen Monitoring Evaluasi agar dilegalkan dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas yang di jawab Dinas satuan Polisi pamong Praja dengan Membuat Dokumen Monitoring Evaluasi yang telah di Legalkan Pada bagian Pengukuran Kinerja hasil evaluasi Inspektorat Terdiri dari :

Pengukuran Kinerja telah di dilaksanakan secara berkala, namun tetapi tidak di ketahui

kan pelaksanaan pengukuran kinerja dan di rekomendasikan untuk Menyusun Jadwal Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala yang di Jawab Dinas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dengan membuat Jadwal Pengukuran kinerja secara Berkala pertriwulan Rencana Aksi Dinas Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Balangan Dalam menindaklanjuti hasil Evaluasi sakip yang di Rekomendasikan Inspektorat dapat di lihat pada table di bawah ini:

RENCANA AKSI ATAS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024			
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN			
1	Nama Penanggung Jawab Data SAKIP/Unit Kerja	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2	Nomor HP Penanggungjawab Data SAKIP	:	081256119291
NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
A Perencanaan Kinerja			
	Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memberikan Informasi tentang Hubungan Kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar Bidang dengan Tugas dan Fungsi lain yang berkaitan dengan Crosscutting	Menyempurnakan diagram crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja	Penyempurnaan Diagram Crosscutting yang menggambarkan kesinambungan antar unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja
	Aktifitas yang di laksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin di capai	Menyesuaikan antara target yang ingin dicapai dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan	Melakukan Penyesuaian antara Target dengan rencana aksi
	Dokumen Evaluasi Kinerja Belum di Legalkan	Dokumen Monitoring Evaluasi agar dilegalikan dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas	Membuat Dokumen Monitoring Evaluasi yang telah di Legalkan
NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
B Pengukuran Kinerja			
	Pengukuran Kinerja telah di laksanakan secara berkala, namun tetapi tidak di ketahui kapan pelaksanaan pengukuran kinerja	Menyusun Jadwal Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala	menjadwalkan Pengukuran kinerja secara Berkala pertriwulan
C Pelaporan Kinerja			
D Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			

Tindak Lanjut Dinas Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Balangan Dalam menindaklanjuti hasil Evaluasi sakip yang di Rekomendasikan Inspektorat dapat di lihat pada table di bawah ini:

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

1	Nama Penanggung Jawab Data SAKIP/Unit Kerja	: BIDANG							
2	Nomor HP Penanggungjawab Data SAKIP	:							

NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET DATA	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN	LINK GOOGLE DRIVE
A Perencanaan Kinerja								
	Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memberikan Informasi tentang Hubungan Kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar Bidang dengan Tugas dan Fungsi lain yang berkaitan dengan Crosscutting	Menyempurnakan diagram crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja	Penyempurnaan Diagram Crosscutting yang menggambarkan Kesinambungan antar unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja	1 Dokumen	Januari-Desember	Kepala sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/file/d/1k8ZCdyoHBo2IfuunaeTN7wvPcNhmHtCSp/view
	Aktifitas yang di laksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin di capai	Menyesuaikan antara target yang ingin dicapai dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan	Melakukan Penyesuaian antara Target dengan rencana aksi	2 Dokumen	Januari-Desember	Kepala sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/foIIders/1-pu8HkqhM26gtTG_yKsMLBoTmvp9A9IQ
	Dokumen Evaluasi Kinerja Belum di Legalkan	Dokumen Monitoring Evaluasi agar dilegalkan dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas	Membuat Dokumen Monitoring Evaluasi yang telah di Legalkan	4 Laporan	Januari-Desember	Kepala sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Progres TW IV	https://drive.google.com/drive/foIIders/1K4pMEZXD7LBd1zgbIVUZ_Xm2V1hdZlq

NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET DATA	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN	LINK GOOGLE DRIVE
B Pengukuran Kinerja								
	Pengukuran Kinerja telah di laksanakan secara berkala, namun tetapi tidak di ketahui kapan pelaksanaan pengukuran kinerja	Menyusun Jadwal Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala	menjadwalkan Pengukuran kinerja secara Berkala per triwulan	1 Dokumen	Januari-Desember	Kepala sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/file/d/1EP0_K7D2j2xR5SwEuaN9B09-PskU1Yoh/view

C Pelaporan Kinerja

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

D Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan di jelaskan bahwa sasaran strategis yang hendak di capai adalah 1.) Menurunnya Pelanggaran Perda, 2). Menurunnya Gangguan Trantibum dengan Indikator :

1. Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti dengan target 100%
2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum dengan target 10%

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja, diperoleh data bahwa secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2024 menunjukkan hasil yang Sangat Baik, Hal ini dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja, yaitu:

- a. Jumlah Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti sebanyak 18 Kasus pelanggaran Perda dan di tindaklanjuti sebanyak 18 kasus pelanggaran Perda dengan Capaian 100% dari Target Kinerja sebanyak 100% dengan capaian 100%.
- b. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 2024 terdapat temuan kasus gangguan Trantibum sebanyak 54 Kasus dari Target Tahun (n-1) sebanyak 60 Kasus dengan capaian Penurunan sebanyak 11,11% dari Target Kinerja sebanyak 10% dengan capaian 111,10%.

Untuk akuntabilitas keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.136.939.315,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 18.136.939.315,- dan sesudah perubahan Anggaran berubah menjadi Rp. 21.223.734.657 yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 20.109.902.677 dan belanja Modal sebesar Rp. 1.113.831.980 dengan penambahan sebesar Rp. 3.086.795.342,- Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir 31 Desember 2024 realisasi keuangan sebesar Rp. 20.034.069.330 (94,39) yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp 18.975.633.410,- (94,36) dan belanja Modal sebesar Rp. 1.058.435.920 (95,03%).

Pencapaian keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2024 berdasarkan IKU yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penyelesaian terhadap Perda dan Perkada dengan mengedepankan mediasi dan persuasif serta

melaksanakan rapat koordinasi Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dengan instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka penegakan Perda dan Perkada. Serta pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang rutin di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang meneyeluruh sampai kepada tingkat kecamatan yang tersebar di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan, serta keberadaan Tim Reaksi Cepat Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRECKK) yang Siaga 1x24 Jam, serta layanan Pengaduan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terbuka 1x 24 jam baik secara offline ataupun secara online, di samping itu penerapan sosialisasi yang merata ke seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Balangan juga sangat berperan penting dalam menurunkan pelanggaran perda dan perkada yang ada di Kabupaten Balangan.

Namun demikian, disatu sisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan juga memiliki hambatan dalam pencapaian kinerja yang lebih optimal, yaitu

1. Kurangnya Sarana Prasara Penunjang Ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kurangnya SDM Satpol PP yang bersertifikasi Kompetensi PPNS
3. Masih rendahnya pengetahuan Anggota Satlinmas Desa dalam tehnik penanganan

Trantibum.

(1) kurangnya sumber daya aparatur Satpol

Pada tahun mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan akan lebih meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024.

B. Tindak Lanjut

Beranjak dari analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan di atas, maka diperlukan upaya merumuskan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan ke depan, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran Masyarakat di dalam memahami ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan Sosialisasi tentang Perda dan Perkada secara menyeluruh.

2. Meningkatkan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan melalui pendidikan dan pelatihan formal; dan pembinaan fisik dan mental anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
3. Melakukan koordinasi secara intensif bersama instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mensinergikan Penegakan Perda dan Perkada dengan instansi terkait.
4. Memberdayakan Anggota Satlinmas desa dan Kelurahan sebagai tenaga bantu dalam menciptakan ketenteraman dan Ketertiban Umum.
5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang refresentatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi ini sangat penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada Rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Balangan.

Paringin, 02 Januari 2025

